

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2012





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2012, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2012.

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP.

Pada periode 2010-2014, BPPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Berdasarkan visi tersebut, misi yang diemban BPPSDMP adalah memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu, memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi, merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel, serta memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan



kemandirian petani, meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian, menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi, meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian, berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani, meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi: (1) pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (2) penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan; (3) pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian; (4) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri; (5) pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten; (6) peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian; (7) pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; (8) pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2012-2014 adalah **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani**. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2012 meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem pelatihan pertanian, revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2012, secara global bervariasi dari **72,07%** sampai dengan **105,72%**. dengan capaian realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 mencapai **92,72% (Rp1.336.947.447.259,00)** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.441.951.871.000,00** atau termasuk kategori baik. Ditinjau dari perbandingan realisasi anggaran tahun 2012 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 merupakan



realisasi anggaran yang tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Serapan anggaran BPPSDMP cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2012 adalah berdasarkan masing-masing sasaran strategis di jelaskan hasil efisiensi capaian indikator kinerja anatara lain :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian dengan efisiensi sebesar **1,06**.
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian dengan efisiensi sebesar **0,93**.
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian dengan efisiensi sebesar **1,01**.
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda dengan efisiensi sebesar **1,19**.
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani dengan efisiensi sebesar **0,80**.

Adapun dari capaian tersebut ada program dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan anggaran/input pagu sebesar Rp 64.790.101.000,- dan realisasi sebesar Rp 58.842.528.766,- atau dengan persentase 90,82%.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2012 adalah: **(1)** Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; **(2)** Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Posko Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di tingkat Kecamatan; **(3)** Masih rendahnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani; **(4)** Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Kelembagaan teknis, Penelitian dan Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan; **(5)** Tidak semua provinsi melakukan pendataan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan; **(6)** Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP yang diterbitkan secara bertahap, mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengurus gapoktan PUAP; **(7)** SK Menteri Pertanian tentang penerima BLM LM3 terbit pada bulan Oktober dan data LM3 yang tidak lengkap mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengelola LM3 dan tidak terpenuhinya target jumlah peserta diklat; **(8)** Data Pejabat Fungsional RIHP di daerah tidak sesuai dengan data pada sekretariat pembina jabatan fungsional RIHP.

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah **(1)** Mempercepat terbitnya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; **(2)** Meningkatkan pembinaan dan advokasi kepada kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota; **(3)** Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan



Kecamatan; **(4)** Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui pelatihan dan magang; **(5)** Meningkatkan intensitas sosialisasi dan advokasi ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang implementasi Permentan No. 45 Tahun 2011; **(6)** Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota dalam pendataan kelembagaan usaha tani di pedesaan. Diklat 2013 bagi Pengurus Gapoktan hanya untuk SK Menteri Pertanian tahap 9 – 15 tahun 2012. Gapoktan yang diatur dalam SK di tahun 2013 akan dilatih pada tahun 2014 dan melakukan revisi kurikulum; **(7)** Percepatan penerbitan SK Menteri Pertanian penerima BLM LM3 dengan data yang akurat dan revisi kurikulum; **(8)** Peninjauan kembali dan perbaikan database pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak , Pengawas Mutu Hasil Pertanian).



KATA PENGANTAR

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP. Di tingkat operasional lapangan, BPPSDMP didukung oleh 2 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 35 Satker Dekonsentrasi dan 73 Satker Tugas Pembantuan.

Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPSDMP Tahun 2012. LAKIP BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPPSDMP selama tahun 2012.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 27 Februari 2013
Plh. Kepala Badan,

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc.
NIP. 19570531 198303 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman.
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi dan Tugas Fungsi	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...	9
A. Rencana Stratejik	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Penetapan Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Akuntabilitas Kinerja	23
B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran ...	24
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja.....	27
BABIV. PENUTUP	32



DAFTAR TABEL

	Halaman.
1. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis BPPSDMP Tahun 2010-2014	10
2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kumulatif BPPSDMP Tahun 2011 s.d 2014	13
3. Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2012	20
4. Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2012	21
5. Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2012	23
6. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2008-2012	27
7. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	28



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman.
1 Penetapan Kinerja Tahun 2012	35
2 Struktur Organisasi BPPSDMP Tahun 2012	36
3 Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2012	37



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka disusunlah LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2012, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2012.



B. Organisasi dan Tugas Fungsi

1. Tugas dan Fungsi

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. Demikian pula dengan nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan administrasi BPPSDMP;

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu:



- b. Pusat Penyuluhan Pertanian;
- c. Pusat Pelatihan Pertanian;
- d. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; dan
- e. Sekretariat BPPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Informasi dengan Subbidang: (1) Program dan Kerjasama; (2) Informasi dan Materi;
- b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Penyuluhan; (2) Ketenagaan Penyuluhan;
- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Petani; (2) Usahatani; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan,



evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
- b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Pelatihan; (2) Ketenagaan Pelatihan; dan
- c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Sistem dan Metode; (2) Evaluasi Penyelenggaraan;

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- b. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan



- c. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri dari 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
- b. Bidang Pendidikan dengan Subbidang: (1) Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan; dan
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi dengan Subbidang: (1) Standardisasi Kompetensi; (2) Sertifikasi Profesi.

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP;

Struktur organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Program dan Kerjasama; (2) Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta (3) Anggaran;



- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Perbendaharaan; (2) Akuntansi dan Verifikasi; serta (3) Perlengkapan;
- c. Bagian Umum, dengan Subbagian-subbagian: (1) Hukum dan Organisasi; (2) Kepegawaian; dan (3) Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Evaluasi; (2) Pelaporan; dan (3) Hubungan Masyarakat; serta
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi BPPSDMP terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif, yaitu kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPPSDMP dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2012 meliputi:

- a. Ditingkat Pusat didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP, dan memiliki kepanjangan organisasi di daerah berupa 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 35 Satuan Kerja (Satker) Pemerintah 1.215 Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 73 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).
- b. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, BPPSDMP didukung oleh 2.388 orang aparat yang terdiri dari aparat yang bertugas di pusat 356 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 2.032 orang. Berdasarkan golongan jumlah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :183 orang golongan I; 687 orang golongan II; orang golongan III dan 1.187 orang golongan IV 331 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan adalah S3 49orang, S2 429 orang, S1/D4 824 orang, S0(D1-D3) 111 orang, SLTA 701 orang SLTP 105 orang dan SD 169 orang, dan dukungan sarana prasarana yang cukup memadai serta dukungan anggaran.



Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian yang dirasakan hingga saat ini meliputi:

- a. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas; dan
- b. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kemudian Lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu peluang (*opportunities*) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan (STPP : 6unit, SMK/SPP:3 unit), pelatihan (10 Balai), maupun penyuluhan pertanian di daerah milik petani yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM pertanian seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) 876unit, Kelompok Tani (Poktan) 307.309 kelompok, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 37.013 gapoktan, dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3 model) 125 unit yang dibawah binaan BPPSDMP;
- b. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS 27.514 orang, Penyuluh Pertanian Honorer 1.251 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 22.163 orang, dan Penyuluh Swadaya 8.344 orang;
- c. Dukungan atau *sharing* pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
- d. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di wilayahnya;
- e. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian yaitu program *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology* (FEATI), *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (READ).



Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Kualitas sebagian besar sumber daya manusia pertanian (petani) yang masih rendah, terutama dari segi pendidikan formal;
- b. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian;
- c. Lemahnya aksesibilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi; dan
- d. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Rencana stratejik (Renstra) BPPSDMP tahun 2010-2014 revisi ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan BPPSDMP yang disesuaikan dengan perubahan organisasi di tingkat Kementerian Pertanian.

1. Visi

Visi BPPSDMP tahun 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi organisasi, BPPSDMP menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu;
- b. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi;
- c. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; dan
- d. Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah:

- a. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani;



- b. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian;
- c. Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi; dan
- d. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah:

- a. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani;
- b. Meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian;
- c. Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani;
- d. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi; dan
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.

Rincian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BPPSDMP selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPPSDMP Tahun 2010-2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.	<ul style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya penyuluhan pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun.2. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		<ol style="list-style-type: none">3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan rencana.4. Terlegitimasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah.5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.6. Teraplikasikannya sistem informasi penyuluhan pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota.7. Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi.8. Meningkatnya jejaring kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.9. Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian oleh 2.500 BPP.10. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.11. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota, 3.000 kecamatan dan 28.304 desa.12. Meningkatnya kinerja 24.608 THL-TBPP.13. Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS.14. Meningkatnya kompetensi dan kinerja 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/ Swasta.15. Tersedianya bahan masukan untuk pengambilan kebijakan penyuluhan pertanian.16. Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usaha tani (Gapoktan).
		<ol style="list-style-type: none">17. Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan.18. Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan.19. Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada 3.000 kelompok.20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/Gapoktan di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI.
2.	Meningkatnya kapasitas 108.855 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian. Serta Berkembangnya 29	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kredibilitas 290 Widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan.2. Meningkatnya kredibilitas 1.792 orang instruktur P4S.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
	kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani	di 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah. 4. Meningkatnya kualitas 108.825 aparatur pertanian. 5. Meningkatnya kapasitas 97.814 petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis. 6. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 14 program pelatihan pertanian sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. 8. Meningkatnya citra pemerintah RI di dunia internasional di bidang pelatihan pertanian. 9. Meningkatnya kredibilitas 29 kelembagaan pelatihan pertanian Pusat dan Daerah. 10. Meningkatnya kredibilitas 891 kelembagaan P4S. 11. Meningkatnya citra Pemerintah R.I di dunia Internasional di bidang pelatihan pertanian. 12. Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 150 desa pada 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	1. Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan di 6 STPP yang akuntabel dan sesuai standar nasional pendidikan. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat fungsional RIHP dan Karantina yang kompeten. 3. Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 6 STPP. 4. Meningkatnya profesionalisme 210 Dosen STPP. 5. Meningkatnya kualifikasi 2.500 orang aparatur pertanian di bidang RIHP dan perkarantinaan pertanian. 6. Meningkatnya kualifikasi pendidikan dan kinerja 1.000 aparatur pertanian. 7. Meningkatnya kualitas program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
		8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. 9. Terlaksananya sertifikasi bagi 5.000 penyuluh pertanian dan 750 non-penyuluh pertanian. 10. Meningkatnya kualitas 300 Asessor kompetensi bidang pertanian. 11. Terselenggaranya diklat profesi di 10 Lembaga DiklatProfesi (LDP). 12. Terselenggaranya uji kompetensi di 10 Tempat Uji Kompetensi (TUK).



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		13. Tersusunnya sertifikasi profesi bidang pertanian untuk 30 unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 14. Meningkatnya profesionalisme 300 orang Guru dan 150 orang tenaga kependidikan SMK-PP 15. Meningkatnya kualitas program pendidikan menengah pertanian. 16. Terselenggaranya pendidikan di 71 unit SMK-PP sesuai standar nasional pendidikan. 17. Meningkatnya kualitas lulusan dari 71 SMK-PP. 18. Menguatnya eksistensi 71 unit SMK-PP. 19. Tersedianya 70.000 tenaga kerja bidang pertanian yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan muda pertanian.
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	1. Meningkatnya kinerja BPPSDMP (Pusat) dan 19 UPT Pusat di bidang pelayanan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan. 2. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kegiatan BPPSDMP. 3. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan BPPSDMP. 4. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP. 5. Meningkatnya pelayanan kehumasan untuk membangun citra positif BPPSDMP

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kumulatif BPPSDMP Tahun 2011 s.d 2014

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani untuk	1. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	18.138	24.443	26.327	29.312
	2. Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	19.080	22.205	22.205	24.014
	3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan	36.000	55.458	55.458	72.000



Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
mendukung empat sukses pembangunan pertanian	(orang) 4. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	1.050	4.429	4.429	5.092
	5. Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda di sektor pertanian (orang)	10.000	16.248	16.248	16.248
	6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani (unit)	38.474	51.763	51.704	72.170
	7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	512	2.088	2.088	2.088
2. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani	1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/ kota (unit)	494	2.044	2.044	2.044
	2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan (unit)	38.304	51.534	51.534	72.000
	3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP. (orang)	36.000	55.458	55.458	72.000
	4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian (judul)	9	4.369	4.369	4.369
	5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian	247	247	247	247
			772	0	0



Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(dokumen)				
	6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI (desa)	3.080	0	0	0
	7. Pembangunan/R ehab BPP (FEATI) (unit)	8	0	0	0
	8. Meningkatkan pelayanan penyuluhan oleh BPP (unit)	217			
3. Meningkatkan kapasitas 108.855 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non- aparatur pertanian. Serta Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya (orang).	17.370	23.166	25.050	28.035
	2. Jumlah non- aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	19.080	22.205	22.205	24.014
	3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (orang)	768	1.277	1.277	1.277
	4. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya .	30	150	150	150
	5. Jumlah NSPK Pelatihan(dokumen)	30	258	258	132
	6. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang berkembang (unit)	10	29	29	29
	7. Jumlah P4S yang berkembang (unit)	170	229	170	170
4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kualifikasi pendidikannya	100	204	204	204



Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	(orang)				
	2. Jumlah tenaga fungsional yang meningkat kualifikasi Pendidikannya (orang)	350	2.825	2.825	2.825
	3. Jumlah kelembagaan pendidikan pertanian yang berkembang (unit)	15	15	15	15
	4. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	30	3.180	3.180	3.180
	5. Jumlah profesi bidang pertanian yang terstandarisasi (profesi)	6	7	7	7
	6. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi (orang)	600	1.400	1.400	2.000
	7. Jumlah NSPK pendidikan pertanian yang tersosialisasi (dokumen)	77	163	163	163
	8. Jumlah tenaga kerja menengah siap pakai dan calon wirausahawan muda (orang)	10.000	16.248	16.248	16.248
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	1. Jumlah NSPK yang tersosialisasi (dokumen)	18	91	91	91
	2. Jumlah bulan pelayanan perkantoran	12	12	12	12



Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPPSDMP yang akuntabel.					

1. Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, maka kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi:

- a. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
- b. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan;
- c. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian;
- d. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri;
- e. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten;
- f. Peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian;
- g. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; dan
- h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.



Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014 adalah:

- a. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat;
- b. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan;
- c. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta;
- d. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdayasaing;
- e. Penataan serta peningkatan kompetensi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian;
- f. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel;
- g. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non-aparatur pertanian;
- h. Peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kelembagaan pelatihan pertanian;
- i. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani (P4S);
- j. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian;
- k. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- l. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian;
- m. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian;
- n. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pertanian;
- o. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian;



- p. Pemantapan sistem perencanaan;
- q. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan
- r. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

6. Program dan Kegiatan

Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2010-2014 adalah **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani**. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2012 meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, terdiri dari pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani serta P3TIP/FEATI;
- b. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, terdiri dari pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian; serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan (*Rural Empowerment and Agricultural Development/READ*);
- c. Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, terdiri dari peningkatan kualitas kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dan
- d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, terdiri dari pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; serta pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.



B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP untuk tahun 2012 disajikan pada :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2012

Unit Eselon I : BPPSDMP

Tahun : 2012

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.	1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota (unit)	2.0443
	2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan (unit)	51.534
	3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP(orang)	55.548
	4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian(judul)	4.369
	5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.(dokumen)	247
	6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI (desa)	772
	7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI) (unit)	0
	8. Meningkatkan pelayanan penyuluhan oleh BPP(unit)	0
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian serta berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat	23.166
	2. kinerjanya. (orang)	
	3. Jumlah non-aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya(orang)	22.205
	4. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kapasitas dan kompetensinya. (orang)	1.277
	5. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa)	150
	6. Jumlah NSPK pelatihan pertanian yang tersosialisasi (dokumen)	258
	7. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang berkembang (unit)	29
	8. Jumlah P4S yang berkembang (unit)	229
3. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kualifikasi pendidikannya (orang).	204
	2. Jumlah tenaga fungsional yang meningkat kualifikasi pendidikannya (orang)	2.825
	3. Jumlah kelembagaan pendidikan pertanian yang berkembang (unit)	15
	4. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	3.180
	5. Jumlah profesi bidang pertanian yang terstandarisasi (profesi)	7
	6. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi (orang)	1.400
	7. Jumlah NSPK pendidikan pertanian yang	107



Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tersosialisasi (dokumen) 8. Jumlah tenaga kerja menengah siap pakai dancalon wirausahawan muda (orang)	16.248
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	1 Jumlah NSPK yang tersosialisasi (dokumen) 2 Jumlah waktu pelayanan perkantoran (bulan)	91 12

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja BPPSDMP untuk tahun 2012 merupakan tindak lanjut rencana kinerja tahunan yang telah mendapatkan anggaran dalam DIP pada tahun 2012, dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada bulan Maret 2012 telah ditandatangani Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2012 antara Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan Menteri Pertanian. Penetapan Kinerja BPPSDMP tahun 2012 seperti disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2012

Unit Eselon I : BPPSDMP
Tahun : 2012

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat kompetensinya (orang)	24.443
	2. Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	22.205
3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	➢ Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	55.458
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian	➢ Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	4.429



4. Meningkatnya ketersediaan tenaga tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda	➤ Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha mudadi sektor pertanian yang tersedia (orang)	16.248
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	➤ Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya (unit)	51.763

Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.419.377.621.000,-.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

BPPSDMP secara formal telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun tersebut dengan capaian seperti disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2012

Unit Eselon I : BPPSDMP
Tahun : 2012

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat kompetensinya (orang)	24.443	19.547	79,97
	2. Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	22.205	23.476	105,72
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	➤ Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	55.458	49.099	88,53
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian	➤ Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	4.429	4.167	94,08
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda	➤ Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda di sektor pertanian yang tersedia (orang)	16.248	14.277	87,87
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	➤ Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya (unit)	51.763	37.305	72,07



B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Peningkatan kompetensi Aparatur dan nonaparatur pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, dan hortikultura); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya dengan target 24.443 orang, terealisasi 19.547 orang (**79,97%**). Hal ini disebabkan pada tahun 2012 adanya kebijakan pengalihan pelatihan aparatur menjadi pelatihan non aparatur, sehingga dilakukan revisi target pelatihan aparatur yang semula 24.443 orang menjadi 19.846 orang (selisih 4.597 orang).

Sedangkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya dengan target 22.205 orang, tercapai 23.476 orang (105,72%). Hal ini disebabkan pada tahun 2012 terdapat kebijakan penambahan sasaran pelatihan non aparatur yang semula 22.205 orang menjadi 24.252 orang (bertambah 2.047 orang).

2. Meningkatnya Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Peningkatan kinerja tenaga penyuluh pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, dan hortikultura); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah ketenagaan penyuluhan di sector pertanian yang meningkat kinerjanya dengan target 55.458 orang, terealisasi sebesar 49.099 orang (88,53%), yang terdiri dari Penyuluh PNS 21.585 orang dan THL-TBPP 27.514 orang.



Hal ini dikarenakan adanya tenaga penyuluh mutasi ke struktural, meninggal dunia, pensiun, dan habisnya masa kontrak THL-TBPP yang tidak diperpanjang lagi.

3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian

Peningkatan kompetensi aparatur fungsional pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, dan hortikultura); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kinerjanya dengan target 4.429 orang terealisasi sebesar 4.167 orang (94,08%). Realisasi tersebut terdiri dari 234 orang aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana; 2.308 orang aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan diploma IV; 356 orang aparatur yang mengikuti pendidikan alih jenjang; 1.296 orang SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi. Hal ini disebabkan karena aparatur fungsional yang telah mengikuti ujian sertifikasi tidak semuanya lulus dan berkurangnya minat aparatur untuk melanjutkan pendidikan diploma IV atau alih jenjang di STPP.

4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah

Ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, dan hortikultura); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda di sector pertanian



yang tersedia dengan target 16.248 orang, terealisasi 14.277 orang (87,87%) generasi muda yang mengikuti pendidikan menengah di SMK-SPP. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan revisi anggaran yang berdampak pada penurunan target yang sedianya 16.248 orang menjadi 13.150 orang sehingga apabila ditinjau dari realisasi sebesar 14.277 orang (108,57%) menunjukkan bahwa minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan di SMK/SPP masih tinggi.

5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani

Peningkatan kemandirian kelembagaan pertanian (Poktan/Gapoktan dan P4S) diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, dan hortikultura); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya dengan target 51.763 unit, terealisasi sebesar 37.305 unit (72,07%) terdiri dari 37.013 unit Poktan/Gapoktan dan 292 unit P4S. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya akses kelompok terhadap permodalan, pemasaran, maupun teknologi khususnya di wilayah Indonesia Timur yang lokasi tempat tinggalnya sangat berjauhan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertaniandan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2012 semula Rp.1.441.951.871.000,- menjadi Rp 1.419.377.621.000,- dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran untuk pemenuhan subsidi BBM. Capaian realisasi anggaran 2012 sebesar: **Rp1.336.947.447.259,-(92,72%)**



Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 lebih baik dan menunjukkan peningkatan⁵ tahun terakhir sejak tahun 2007. Perkembangan realisasi serapan anggaran BPPSDMP selama 5 tahun terakhir tampak pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMPTahun 2008 -2012

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2008	940.068.111.000	780.633.105.000	83,04
2009	1.237.774.000.000	1.072.838.080.000	86,67
2010	1.247.591.158.000	1.090.519.431.208	87,41
2011	1.320.518.142.000	1.199.341.659.670	90,67
2012	1.441.951.871.000	1.336.947.447.259	92,72

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.



Berdasarkan masing-masing sasaran strategis di jelaskan hasil efisiensi capaian indikator kinerja di jelaskan tabel berikut.

Tabel 6 : Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fisik/Output				Anggaran/Input		%	Efisiensi
			Target	Revisi Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi		
1	Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat kompetensinya (orang)	24.443	19.846	19.547	98,49	384.196.897.000	353.328.993.776	91,97	1,06
		Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	22.205	24.252	23.476	96,80				
		Rata-rata				97,65				
2	Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	55.458	-	49.099	88,53	459.151.655.000	436.383.846.410	95,041	0,93
3	Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian	Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	4.429	-	4.167	94,08	162.963.351.000	152.269.149.915	93,438	1,01
4	Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda	Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda di sektor pertanian yang tersedia (orang)	16.248	13.150	14.277	108,57	43.613.250.000	39.934.102.910	91,564	1,19
5	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya (unit)	51.763	-	37.305	72,07	327.236.617.000	296.188.825.482	90,512	0,80



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fisik/Output				Anggaran/Input		%	Efisiensi
			Target	Revisi Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi		

Dari keterangan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa efisiensi dari masing-masing sasaran strategis adalah :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian dengan efisiensi sebesar **1,06**.
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian dengan efisiensi sebesar **0,93**.
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian dengan efisiensi sebesar **1,01**.
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda dengan efisiensi sebesar **1,19**.
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani dengan efisiensi sebesar **0,80**.

Adapun dari capaian tersebut ada program dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan anggaran/input pagu sebesar Rp 64.790.101.000,- dan realisasi sebesar Rp 58.842.528.766,- atau dengan persentase 90,82%.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis kinerja BPPSDMP pada tahun 2012, sebagai berikut:

1. Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
2. Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan sebagai Posko Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di tingkat Kecamatan;



3. Masih rendahnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani;
4. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Kelembagaan teknis, Penelitian dan Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan;
5. Tidak semua provinsi melakukan pendataan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan;
6. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP yang diterbitkan secara bertahap, mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengurus gapoktan PUAP;
7. SK Menteri Pertanian tentang penerima BLM LM3 terbit pada bulan Oktober dan data LM3 yang tidak lengkap mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengelola LM3 dan tidak terpenuhinya target jumlah peserta diklat;
8. Data Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkungan Pertanian (RIHP) di daerah tidak sesuai dengan data pada sekretariat pembina jabatan fungsional RIHP.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah:

1. Mempercepat terbitnya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Meningkatkan pembinaan dan advokasi kepada kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan;
4. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui pelatihan dan magang;
5. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan advokasi ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang implementasi Permentan No. 45 Tahun 2011;



6. Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian di Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota dalam pendataan kelembagaan usaha tani di pedesaan. Diklat 2013 bagi Pengurus Gapoktan hanya untuk SK Menteri Pertanian tahap 9 –15 tahun 2012. Gapoktan yang diatur dalam SK di tahun 2013 akan dilatih pada tahun 2014 dan melakukan revisi kurikulum;
7. Percepatan penerbitan SK Menteri Pertanian penerima BLM LM3 dengan data yang akurat dan revisi kurikulum;
8. Peninjauan kembali dan perbaikan database pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak , Pengawas Mutu Hasil Pertanian).



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban BPPSDMP selama tahun 2012, pada tahun 2012 sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam lima sasaran strategis yang dipayungi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2012 dengan kisaran 72,07% sampai dengan 105,72%. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai **92,72%**, atau sebesar Rp. 1.336.947.447.259,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.441.951.871.000,-. Capaian realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2012 sebesar 92,72% merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2012 adalah **(1)** Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

(2) Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Posko Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di tingkat Kecamatan; **(3)** Masih rendahnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani; **(4)** Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Kelembagaan teknis, Penelitian dan Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan; **(5)** Tidak semua provinsi melakukan pendataan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan; **(6)** Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP yang diterbitkan secara bertahap, mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengurus gapoktan PUAP; **(7)** SK Menteri Pertanian tentang penerima BLM LM3 terbit pada bulan Oktober dan data LM3 yang tidak lengkap mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengelola LM3



dan tidak terpenuhinya target jumlah peserta diklat; **(8)** Data Pejabat Fungsional RIHP di daerah tidak sesuai dengan data pada sekretariat pembina jabatan fungsional RIHP.

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah **(1)** Mempercepat terbitnya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

(2) Meningkatkan pembinaan dan advokasi kepada kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota; **(3)** Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan; **(4)** Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui pelatihan dan magang; **(5)** Meningkatkan intensitas sosialisasi dan advokasi ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang implementasi Permentan No. 45 Tahun 2011;

(6) Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota dalam pendataan kelembagaan usaha tani di pedesaan. Diklat 2013 bagi Pengurus Gapoktan hanya untuk SK Menteri Pertanian tahap 9 – 15 tahun 2012. Gapoktan yang diatur dalam SK di tahun 2013 akan dilatih pada tahun 2014 dan melakukan revisi kurikulum;

(7) Percepatan penerbitan SK Menteri Pertanian penerima BLM LM3 dengan data yang akurat dan revisi kurikulum; **(8)** Peninjauan kembali dan perbaikan database pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian).



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

Penetapan Kinerja tahun 2012



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haryono
Jabatan : Plh. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suswono
Jabatan : Menteri Pertanian R.I

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Suswono)



Jakarta, Maret 2012

Pihak pertama

(Haryono)



LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

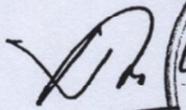
Unit Organisasi Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 Meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	- Jumlah aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya(orang)	24,443
	- Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	22,205
2 Meningkatkan kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	- Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	55,458
3 Meningkatkan kompetensi aparatur fungsional pertanian	- Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)	4,429
4 Meningkatkan ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon Wirausahawan muda	- Jumlah tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda di sektor pertanian yang tersedia (orang)	16,248
5 Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani	- Jumlah kelembagaan Petani yang meningkat kemandiriannya (unit)	51,763

Jumlah Anggaran :

Program : Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani : Rp. 1.419.377.621.000

Menteri/Pimpinan Lembaga,


Suswono



Jakarta, Maret 2012
Plh Kepala Badan BPPSDMP


Haryono





LAMPIRAN 2.

Struktur Organisasi BPPSDMP



LAMPIRAN 3.

Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2012

**DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN AKHIR
KEMENTERIAN PERTANIAN**

PER : 29 JANUARI 2013

UNIT KERJA : BADAN PPSDM PERTANIAN

No	UNIT KERA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	BADAN PPSDM PERTANIAN												
2	SEKRETARIAT BADAN	1	23	60	1	4	9			59	8	9	174
3	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	3	26	36			1			18		1	85
4	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	1	14	21			2			11	1		50
5	PUSDIK DARKASITAN	2	15	17	1		2			9			46
6	PPMKP CIAWI	2	27	44	1	1	4	1		74	18	47	219
7	STPP MEDAN	1	23	18	8		4			25	1	1	81
8	STPP BOGOR	6	38	31	16		2			38	11	21	163
9	STPP MAGELANG	7	44	53	28	3	10	1		60	9	10	225
10	STPP MALANG	8	26	33	27	2	8			43	11	11	169
11	STPP GOWA	6	26	26	14		4			26			102
12	STPP MANOKWARI	1	15	24	4		4			15	2	11	76
13	BBPP LEMBANG	2	25	44	2	1	6			36	4	3	123
14	BPPKH CINAGARA		19	20	6		4			19	3	6	77
15	BBPP, BATU	5	10	20	8		9			29	1	11	93
16	BPBPP, KETINDAN	1	20	32	1		6			24	7	7	98
17	BBPP, BATANGKALUKU	1	20	24			3			31	8	7	94
18	BBPP, BINUANG	1	7	18	4		1			27	2	6	66
19	BBPP, KUPANG		11	21	5		7			28	1	3	76
20	BPP, JAMBI	1	14	20	5		2			36	2	3	83
21	BPP, LAMPUNG		5	30	3		5			19	6	2	70
22	SPPN, SEMBAWA		9	34	9		2			29	3	4	90
23	SPPN, BANJAR BARU		6	22	4		1			22	4	2	61
24	SPPN, KUPANG		6	21	6	1				23	3	4	64
	JUMLAH	49	429	669	153	12	96	2	0	701	105	169	2385